

BISAKAH PETANI BERHENTI MENANAM JAGUNG DI KAWASAN HUTAN ?

Oleh Markum, Dosen Unram dan Ketua Forum DAS-LH NTB

Akhir bulan Maret ini akan mulai panen raya jagung di NTB. Momen ini tentu mengundang kegembiraan bagi petani, namun juga memunculkan kecemasan bagi pemerhati lingkungan. Komoditi jagung ibarat dewa yang memiliki dua kekuatan, baik dan buruk, pemberi anugerah tetapi juga sekaligus perusak. Satu sisi dianggap sebagai penyelamat hidup petani, di sisi lain dianggap sebagai tersangka utama penyebab banjir. Tidak heran jika bicara soal jagung, akan selalu mengundang kontroversi. Pertanyaannya, bisakah petani berhenti menanam jagung di kawasan hutan ?



Daya Dorong Jagung Sangat Kuat

Kawasan hutan di NTB khususnya di daratan Pulau Sumbawa, saat ini terlihat hijau royo-royo, maklum karena mendapat guyuran hujan sejak akhir Desember yang lalu, Namun jika dicermati lebih dekat, hijaunya kawasan hutan tersebut karena semaraknya petani menanam jagung. Ya, kawasan hutan di NTB sebagian besar telah mengalami transformasi menjadi lahan pertanian dengan komoditi utama jagung. Mengapa jagung, mengapa bukan tanaman lain, tentu ada beberapa faktor yang sangat kuat sebagai daya dorongnya.

Simak saja dari perspektif nasional, produksi jagung terus digenjot untuk memenuhi target nasional yang juga belum tercapai, sehingga Kementerian Pertanian terus memacu perluasan tanam di seluruh wilayah provinsi, tidak terkecuali NTB. Kebijakan tersebut diikuti dengan kemudahan petani mendapatkan benih jagung, tersedianya pupuk, dan jaminan pasar hasil panen. Faktor lain adalah kondisi biofisik daratan kita, yang sebagian besar lahan kering, dan mengandalkan tadah hujan, sehingga hanya bisa tanam 1 kali setahun. Pilihan yang memungkinkan adalah jagung, karena adaptif dengan kondisi lingkungan yang ada, tidak

butuh pengelolaan yang rumit, hasilnya bisa dikonsumsi keluarga dan nilai produksinya tinggi.

Bagi petani, jagung adalah sumber mata pencaharian andalan untuk menutupi kebutuhan hidupnya, sebagai dewa penyelamat, ketika di desa, khususnya masyarakat di sekitar kawasan hutan, yang memiliki keterbatasan sangat tinggi dalam penyediaan lapangan kerja, dan kegiatan-kegiatan produktif lainnya. Empiriknya, siklus hidup rumah tangga banyak ditopang oleh produksi jagung yang hanya bisa ditanami setahun sekali. Lantas berapa nilai produksi jagung, layakkah secara ekonomi ?

Nilai Pendapatan Jagung

Saya mencoba membuat hitung-hitungan sederhana untuk mengetahui berapa sesungguhnya hasil tanam jagung di lahan kering (ladang). Sumber informan saya ada di Taliwang, KSB, di Lunyuk Kabupaten Sumbawa dan di Hu'u Kabupaten Dompu. Pendapatan bersih yang diterima petani jagung untuk setiap hektarnya pada kisaran Rp 19 – 22 juta dengan produktivitas 7-9 ton/ha. Pendapatan tersebut telah dikurangi dengan biaya sarana produksi semua komponen termasuk upah tenaga kerja Rp 8 – 10 juta. Itu artinya budidaya jagung mampu memberikan penghasilan rumah tangga petani hampir Rp 2 juta setiap bulannya. Bandingkan misalnya dengan guru honor di SD Rp 900.000/bulan, dan bahkan masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan pendapatan dari budidaya padi sebesar Rp 11 – 13 juta/ha, dengan produktivitas 4-5 ton/ha.

Dilihat dari kalkulasi pendapatan tersebut di atas, kelihatannya jerih payah petani bisa dibilang impas, cukup sepadan antara usaha dan hasilnya. Realitas di masyarakat, jagung juga tidak semata bernilai ekonomi bagi rumah tangga petani, tetapi juga punya implikasi luas terhadap penyerapan tenaga kerja dan ketahanan pangan penduduk. Tidak kurang dari 90 Hari Kerja (HKO) terserap di kegiatan budidaya jagung, di luar tenaga kerja rumah tangga petani itu sendiri. Dari aspek ketahanan pangan, sebagian dari rumah tangga petani menyimpan hasil panen untuk cadangan pangan keluarga.

Betulkah Jagung Penyebab Banjir ?

Praktik budidaya jagung saat ini cenderung menggunakan cara-cara instan, mulai dari membersihkan lahan, bahkan dengan membakar lahan, termasuk menebang tegakan pohon, dan pengelolaan tanah tidak menggunakan sistem terasering. Teknik ini dilakukan secara berulang setiap tahun. Maka saya bisa yakini, cara-cara seperti ini akan menyumbang erosi dan terjadinya banjir.

Dari sudut pendapatan petani, cukup meyakinkan bagaimana kontribusi jagung terhadap daya dukung ekonomi rumah tangga petani. Tapi, bagaimana dampaknya terhadap lingkungan, sudahkan dikalkulasi ? Disinilah wujud kompleksitas dari sebuah praktik kelola lahan di kawasan hutan, yang sesungguhnya memerlukan prinsip kehati-hatian, dan dituntut tidak hanya berorientasi pada hasil jangka pendek saja, tetapi juga keberlanjutan jangka panjang.

Saya ibaratkan, budidaya jagung itu seperti sebuah kendaraan bermesin ekonomi yang bertabrakan dengan kendaraan mesin lingkungan. Mesin ekonomi dibekali dengan cc yang besar dan fitur lengkap, ditandai ada dukungan kebijakan pusat, anggaran yang cukup memadai, pasar yang pasti dan kontribusi ekonomi yang jelas, termasuk untuk daerah dan nasional. Sementara mesin lingkungan sebaliknya, lemah dalam pengawasan, lemah dalam penegakan hukum, termasuk lemah dalam alokasi anggaran. Jelas dalam konteks ini, sudah bisa ditebak, siapa yang lebih kuat, dan siapa yang menang.

Bisakah Budidaya Jagung dihentikan ?

Siapa menanam, mereka yang menuai, dalam konteks kebencanaan pepatah tersebut kelihatannya tidak relevan. Mengapa ? Dalam kasus jagung, mereka yang menanam adalah berada di wilayah hulu (*upland*), sedangkan dampak banjirnya ada di wilayah hilir (*lowland*). Maka kita tidak mungkin bisa melarang petani di hulu untuk berhenti menanam jagung di kawasan hutan, selama tidak ada pengganti yang lebih bermanfaat, setidaknya sama dengan hasil jagung. Inilah kiranya tantangan terbesar para pemerhati lingkungan, bagaimana melahirkan inovasi menggantikan atau mengintegrasikan tanaman jagung yang lebih ramah lingkungan. Pada akhirnya mengelola sumber daya alam terkadang harus kompromi dengan realitas yang ada, tidak terus terjebak dalam kontradiksi-kontradiksi yang tidak produktif.

---000---